

INFO DEMOGRAFI

Dr. Ir. LILIS HERI MIS CICIH, MSi
LD-FEB Universitas Indonesia

KUALITAS PENDUDUK DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kondisi alam sedang kurang bersahabat. Hujan terus menerus menimbulkan bencana banjir dan longsor di beberapa titik wilayah. Tentunya kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, namun juga nyawa manusia. Bencana memang merupakan takdir dari yang Maha Kuasa. Tapi adakalanya bencana disebabkan karena ulah manusia sendiri, yang merusak ekosistem alam. Sebagai contoh, terjadinya bencana longsor, dapat disebabkan karena manusia membat pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyangga di daerah lereng atau tebing. Akibatnya ketika hujan terus menerus, tanah menjadi rapuh dan mudah untuk bergerak menuju tempat yang lebih rendah. Sementara itu, banjir yang terjadi selain curah hujan yang begitu besar, juga karena daerah aliran air mengalami penyempitan. Beberapa permukiman dibangun di daerah pinggiran aliran sungai, atau aliran air ditutup untuk jalan, trotoar dan sebagainya.

Kekhawatiran muncul terkait dengan semakin bertambah penduduk, yang pada akhirnya akan menyebabkan bencana lingkungan. Para ahli mengatakan bahwa penduduk merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan.¹ Namun para ilmuwan pun belum secara pasti menentukan 'daya dukung' manusia di Bumi.

Penduduk sebagai subjek dari pembangunan suatu bangsa, selayaknya mempunyai pengetahuan dalam mengelola sumber daya yang ada, serta memperhatikan setiap dampaknya terhadap lingkungan. Jika tidak, maka akibatnya dapat dirasakan oleh penduduk sendiri. Selain itu, pemerintah juga perlu mengimplementasikan *good governance* dan secara arif dalam menjaga lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan membahas keterkaitan antara penduduk dan lingkungan hidup. Sebenarnya ini bukan merupakan isu yang baru, namun sampai saat ini persoalannya masih terus berlanjut. Bahkan mungkin semakin memprihatinkan, karena sekarang ini sudah banyak ketidakseimbangan alam, dan terjadinya perubahan iklim global. Diharapkan dengan tulisan ini, dapat memberikan harapan baru dan pengetahuan, sehingga dapat menyadarkan penduduk untuk selalu menjaga lingkungannya. Penduduk lebih memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesehatan, tidak sekedar keuntungan ekonomi semata.

Permasalahan Penduduk

Permasalahan kependudukan yang selalu dihadapi oleh berbagai Negara menyangkut masalah jumlah penduduk yang tinggi, angka kelahiran dan kematian bayi yang tinggi, urbanisasi, pengangguran, dan ketidakmerataan penyebaran penduduk. Jika permasalahan ini semakin kompleks, tentunya akan berdampak pada aspek lainnya dalam kehidupan manusia, termasuk kelestarian lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk merupakan aspek yang sering dikaitkan dengan daya dukung lingkungan. Penduduk yang semakin bertambah dan tanpa penanganan yang baik, dikhawatirkan mendorong penggunaan lahan secara besar-besaran dan berdampak pada rusaknya lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk sering menjadi isu perbincangan terkait lingkungan.

Semakin menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat pertumbuhan penduduk, diperlukan implementasi nyata adanya *good governance*. Adanya sikap bersama antara pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap keseimbangan antara pertumbuhan penduduk berikut segala dimensinya dengan kelestarian lingkungan. Sebagai bentuk nyata dapat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan hutan yang tidak sesuai aturan. Selain itu juga sanksi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Apabila hal ini tidak diterapkan dengan baik, maka semakin meningkatnya jumlah penduduk dapat semakin berdampak buruk pada lingkungannya.

Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika. Menurut data *United Nations* (PBB= Perserikatan Bangsa-bangsa), bahwa jumlah penduduk Indonesia Tahun 2017 sekitar 263,991,379 orang.² Pada Tahun 2050 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 322,237,404 orang.³

Persoalan penduduk tidak hanya sekedar jumlah, melainkan juga terkait dengan distribusi (kepadatan, pola migrasi, dan urbanisasi), serta komposisinya (umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan), dan yang sangat penting lagi komposisinya. Dari segi pertumbuhan, penduduk Indonesia tumbuh sekitar 1,1 persen per tahun. Sementara kepadatan penduduknya sekitar 146 orang per kilometer persegi.² Semakin meningkatnya jumlah penduduk, diperkirakan kepadatan penduduk juga semakin meningkat. Pada Tahun 2000 kepadatan penduduk Indonesia sekitar 107 jiwa per km persegi, meningkat menjadi 139 jiwa per km persegi.⁸

Daya Dukung Bumi

Jumlah penduduk yang banyak tersebut memerlukan berbagai kebutuhan untuk hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, yang memerlukan sumberdaya alam. Selain itu, banyaknya penduduk dapat menghasilkan limbah dalam jumlah besar, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan merugikan penduduk itu sendiri. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, dan cair, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada kesehatan penduduk. Para ahli mengemukakan, bahwa dampak dari jumlah penduduk yang sangat banyak terhadap lingkungan dapat dilihat dari dua hal¹:

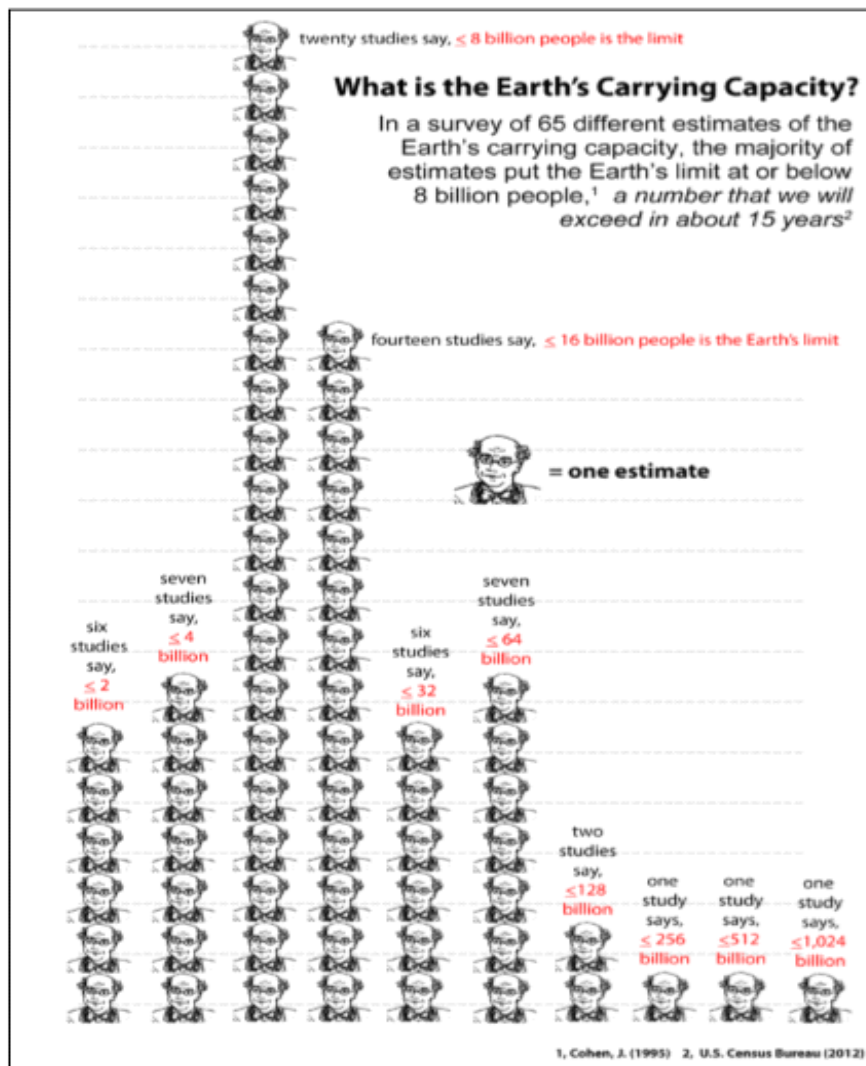
1. Konsumsi sumber daya, seperti tanah, makanan, air, udara, bahan bakar fosil dan mineral
2. Produk limbah sebagai akibat konsumsi, seperti polutan udara dan air, bahan beracun dan gas rumah kaca

Suatu hal yang wajar jika penduduk semakin banyak, maka berdampak pada ketersediaan sumber daya, seperti air minum, lahan subur, hutan dan perikanan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa penduduk lebih banyak, maka lebih banyak sumber daya yang digunakan, dan menghasilkan lebih banyak sampah. Namun yang menjadi pertanyaan, berapa batas bahwa penduduk dianggap banyak? Berapa banyak penduduk yang dapat didukung oleh bumi? Pertanyaan ini tidak mudah untuk diberikan jawaban, meskipun sudah beberapa penelitian dilakukan, hanya sebatas perkiraan saja.

Terkait penduduk dan daya dukung lingkungan, kita mengenal Teori Malthus, yang mengemukakan bahwa “daya dukung” merupakan ukuran penduduk maksimum yang dapat dipertahankan oleh lingkungan tanpa batas waktu. Berapa jumlah maksimum penduduk yang dapat didukung di bumi menjadi perdebatan sejak beberapa ratus tahun lalu. Ada yang memperkirakan sekitar 500 juta orang sampai satu triliun orang.¹ Namun para ilmuwan tidak setuju dengan hal tersebut, karena menurut mereka yang lebih penting adalah bagaimana cara yang terbaik dan akurat untuk menentukan jumlah tersebut.

Lebih lanjut dapat dilihat dari hasil sebagian besar penelitian yang memperlihatkan bahwa kapasitas bumi kurang dari 8 (delapan) miliar orang.⁴ Berikut dapat dilihat **Gambar 1** yang menyajikan perkiraan daya dukung bumi yang bervariasi secara dramatis. Perkiraan ini diperoleh dari hasil survei yang terdiri dari 65 perkiraan yang berbeda.

Pada sekitar abad ke-17, dimulai perkiraan tentang daya dukung planet. Ketika itu, seorang ilmuwan Belanda Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) memperkirakan bahwa penduduk Belanda sama dengan 13 miliar orang.⁵ Setelah itu, mulailah bermunculan perkiraan mengenai berapa banyak penduduk yang dapat didukung Bumi. Namun hasil perkiraan ini sangat bervariasi, karena tergantung dari metode yang digunakan oleh para ahli. Sebagai contoh, 94 perkiraan yang berbeda terhadap batas maksimum jumlah penduduk yang dapat ditampung oleh bumi, mulai dari 500.000 orang sampai 1.000.000.000.000.000 orang.⁵



Sumber: UNEP Global Environmental Alert Service / One Planet, How Many People?

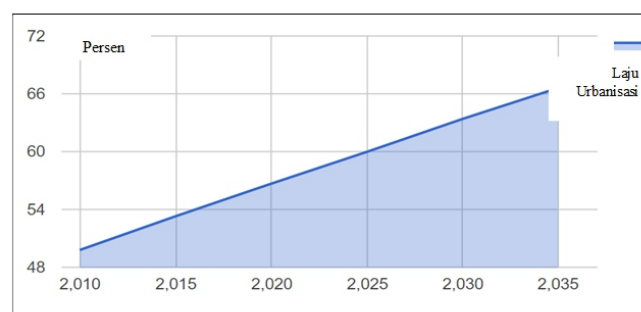
Gambar 1. Variasi Perkiraan Daya Dukung Bumi

Menarik untuk melihat hal ini. Penelitian lain menentukan batas maksimal jumlah penduduk yang dapat didukung oleh bumi yaitu karena ada faktor penghambat. Para ahli mengasumsikan faktor penghambat untuk memperkirakan batasan jumlah penduduk adalah jumlah maksimum penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan makanan. Ahli lain mengasumsikan serangkaian kemungkinan kendala (misalnya makanan, air dan bahan bakar), dan yang paling sedikit ini akan menetapkan batas jumlah penduduk. Metode perkiraan lainnya juga banyak dikemukakan oleh para ahli, termasuk dengan menggunakan pendekatan pemodelan sistem dinamik.

Sebenarnya yang lebih penting bukan memperkirakan batas maksimal jumlah penduduk, namun pemahaman dinamika sistem kompleks yang menjadi dasar kelangsungan hidup penduduk. Pertimbangan yang lebih penting bukan hanya pada kuantitas, melainkan pada kualitas-Buminya. Secara teoritis mungkin bumi dapat mendukung lebih dari satu triliun orang, namun yang lebih penting bagaimana kualitas hidupnya? Apakah penduduk cukup memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman, atau mereka hidup dengan keterbatasan sumberdaya yang ada?

Distribusi Penduduk

Tidak hanya jumlah, namun distribusi penduduk juga memegang peranan penting, karena cara penduduk tersebar di bumi memiliki dampak pada lingkungan. Wilayah-wilayah dengan tingkat kelahiran yang lebih tinggi, mempunyai kecenderungan penduduknya tumbuh lebih cepat, dan dapat menambah tekanan pada lingkungannya. Selain itu, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan atau urbanisasi. Pada Tahun 2010 hampir setengah penduduk Indonesia tinggal di kota, dan meningkat pada Tahun 2035 menjadi hampir dua pertiganya. Seperti tampak pada **Gambar 2**. Peningkatan penduduk di daerah perkotaan, antara lain disebabkan dengan semakin banyak orang yang menuju ke kota mencari pekerjaan dan kesempatan. Hal ini seringkali melampaui laju pembangunan, yang mengarah ke daerah kumuh/miskin, dan tingkat polusi lebih tinggi. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada ketersediaan sumber daya, seperti air, energi dan makanan. Selain itu, dengan bertambahnya penduduk, tingkat polusi juga cenderung menjadi tinggi, sebagai akibat meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, pemanas dan peralatan modern lainnya yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan lokal.



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035 (2013), BPS-Bappenas-UNPPA

Gambar 2. Tren Urbanisasi di Indonesia, 2010-2035

Dampak Terhadap Lingkungan

Permasalahan kependudukan terhadap kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia, dan berbagai bangsa di dunia. Berbagai contoh permasalahan yang dihadapi antara lain masalah pencemaran lingkungan fisik, desertifikasi, deforestasi, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber-sumber alam, dan berbagai fenomena degradasi ekologis yang semakin meningkat.

Keprihatinan ini selayaknya mendorong untuk menetapkan agenda penanganan masalah lingkungan yang bijak. Selain itu, juga sebagai alat untuk kewaspadaan bagi kehidupan, bahwa kondisi lingkungan hidup sedang berada pada tahap memprihatinkan. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka kerusakan lingkungan semakin parah, dan dapat berakibat lebih buruk lagi bahkan mengancam kepunahan.

Penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dapat meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang semena-mena tentunya berdampak pada berubahnya ekosistem, misalnya perubahan keanekaragaman hayati. Selain itu, dapat merubah lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik.

Berbagai ahli kependudukan berpendapat bahwa semakin cepat pertumbuhan penduduk, maka akan membawa akibat kepada tekanan yang kuat terhadap sumber daya alam. Seperti meningkatnya kebutuhan pangan, air bersih, pemukiman dan sebagainya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara persediaan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia.

Kelestarian lingkungan juga dapat terganggu jika penduduk di suatu wilayah semakin meningkat, dan menjadi semakin padat. Dampak hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh berikut⁷:

- (1) Meningkatnya limbah rumah tangga atau limbah domestik. Kondisi ini akan menjadi masalah, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah padat atau kumuh perkotaan. Persoalan tempat pembuangan sampah menjadi bahan perdebatan yang kadang tidak kunjung selesai.
- (2) Pertumbuhan penduduk yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang melahirkan industri dan sistem transport modern.
- (3) Peningkatan kebutuhan pangan, yang dapat dipenuhi antara lain dengan intensifikasi lahan pertanian (menggunakan pupuk pestisida, yang juga merupakan sumber pencemaran). Selain itu, juga kebutuhan lahan pertanian, yang kadang mengeksploitasi hutan.
- (4) Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya.

Sektor kehutanan telah mengalami perhatian tidak hanya di Indonesia melainkan juga di Negara-negara di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, sebagian besar dimanfaatkan oleh kepentingan sekelompok orang saja atau para pemilik modal.

Sementara itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga dan memelihara kelestarian hutan dengan segala isinya. Pada kenyataannya kadang dikalahkan oleh kepentingan ekonomi daripada menjagakeseimbangan ekologi. Kondisi ini diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat memicu konversi lahan hutan untuk dijadikan perumahan, perkebunan, pertanian dan proyek-proyek industri lainnya. Kerusakan hutan juga dapat diakibatkan oleh penebangan hutan yang dilakukan para pemilik HPH dan HPHTI, yang mengharuskan melakukan tebang pilih. Meskipun sudah ada peraturan, namun prakteknya mereka melakukan sistem tebang habis tanpa mengindahkan kelestarian hutan. Selain itu, mereka juga kadang tidak melakukan reboisasi secara menyeluruh, yang menjadi kewajibannya setelah melakukan penebangan. Sayangnya kondisi seperti ini seperti dibiarkan dan dianggap tidak ada atau menutup mata.

Kondisi seperti inilah yang menjadikan kerusakan lingkungan semakin parah, sementara masyarakat tidak kunjung sejahtera, bahan bisa semakin buruk kondisinya. Karena keuntungan dari pemanfaatan sumber daya yang ada hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja. Sementara dampaknya, yang kadang menjadi bencana, mengancam seluruh masyarakat. Sebagai contoh, penebangan hutan dilakukan oleh perusahaan atau sekelompok tertentu, sementara musibah banjir, asap tebal dibeberapa wilayah seperti di Kalimantan dan Sumatera menimpa seluruh masyarakat di sekitarnya.

Penanganan Kualitas Penduduk

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan, apabila kualitas sumber daya manusianya (SDM) tinggi. Tentunya untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi bukan suatu hal yang instan, namun perlu dipersiapkan dalam jangka panjang. Bukan saat seseorang masuk ke pasar kerja, melainkan jauh sebelum janin terbentuk, dalam arti sejak dari remaja putri calon ibu.

Seorang remaja putri yang akan menjadi calon ibu, selayaknya mempunyai status gizi yang baik, tidak anemia. Jika seorang ibu hamil kurang gizi dan anemia, maka dikhawatirkan akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram dan panjang badan kurang dari 48 cm umumnya berisiko kurang gizi dan rentan terhadap berbagai penyakit. Apabila bayi tersebut kurang penanganan pasca lahir, maka dikhawatirkan kondisi tersebut akan berlanjut sampai usia selanjutnya.

Ketika masa sekolah, akan tumbuh menjadi anak yang kurang dalam prestasi akademik, dan tentunya ini akan berdampak pada saat orang tersebut masuk dalam pasar kerja. Jika kondisi ini diiringi dengan mental dan spiritual yang baik, maka penduduk tersebut akan tumbuh menjadi orang yang bijak. Penduduk tersebut dalam memanfaatkan segala sesuatu termasuk sumber daya alam yang ada dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang terjadi terhadap kehidupan manusia.

Sebagai upaya untuk menangani peningkatan kualitas SDM menekankan pada ibu hamil untuk menjaga asupan gizinya, sehingga membantu pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan janinnya secara optimal. Pemantauan tersebut dilakukan secara terus menerus, terutama di periode emas pertumbuhan anak antara 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun. Upaya ini juga sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi anak untuk tumbuh dengan baik, dan terhindar dari panjang tinggi badan atau panjang badan yang *stunting* (pendek).⁶

Masa penanganan bayi di periode emas 0-24 bulan ini sangat penting, karena jika penanganannya baik akan memperbaiki status gizi anak. Sebaliknya jika gangguan pertumbuhan tersebut berlanjut, dan tidak dilakukan penanganan dengan baik sampai usia anak dua tahun, maka kondisi gangguan pertumbuhannya tidak dapat dikoreksi.

Kondisi bayi yang mengalami kekurangan gizi perlu diupayakan pada saat dilahirkan atau satu jam kehidupan pertamanya untuk mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Kegiatan IMD ini merupakan proses meletakkan bayi baru lahir pada dada atau perut sang ibu agar bayi secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusu.⁶ Hal ini sangat bermanfaat karena bayi mendapatkan kolostrum yang terdapat pada tetes ASI pertama ibu, yang mengandung zat kekebalan tubuh. Selain bagi bayi, IMD ini juga bermanfaat bagi ibu, terutama membantu mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Meskipun demikian, tidak semua ibu dapat memanfaatkan IMD ini karena berbagai hal, seperti kurang pengetahuan dan dukungan dari lingkungannya. Dukungan seperti ini sangat penting baik dari pasangannya, keluarga, maupun seluruh stakeholder di sekitarnya. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung status gizi bayi adalah dengan pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja sampai bayi berusia enam bulan. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan tersebut melarang pemberian susu formula bagi bayi 0-6 bulan, apalagi bayi baru lahir. Upaya pemberian IMD dan ASI ini merupakan langkah untuk meningkatkan status gizi bayi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu, setelah pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, dan atau ASI selama dua tahun, perlu memperhatikan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI). Hal yang penting untuk diperhatikan adalah praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), harus diberikan dengan baik.

Status gizi anak bawah lima tahun (balita) juga ditentukan oleh asupan gizinya yang seimbang, dan ini tergantung dari ketersediaan bahan makanan yang layak dikonsumsi. Seperti akhir-akhir ini kasus gizi buruk yang ditemukan di wilayah Asmat Papua, yang sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Memang berbagai macam faktor status gizi buruk pada anak, selain ketersediaan makanan, juga karena pengetahuan dari orang tua atau ibunya. Jika dikaitkan dengan kondisi sumber daya alam yang ada di sana, dan kebiasaan hidup masyarakatnya, maka selayaknya sumber-sumber makanan mereka lebih diperhatikan.

Kadang demi mengejar keuntungan ekonomi dan dalih untuk pembangunan, alih fungsi lahan seringkali mengabaikan dampak sosial dan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Awalnya masyarakat mengandalkan sumber makanan dari tanaman sekitar hutan atau kebun mereka, karena sudah beralih fungsinya sehingga masyarakat tidak dapat memperolehnya lagi. Sementara tidak ada yang peduli untuk mengalihkan dan mencerdaskan masyarakat untuk beralih ke sumber lainnya. Hal ini seharusnya pemerintah mendorong masyarakat untuk tetap mempunyai akses terhadap pemenuhan kebutuhan makanan. Pemerintah juga perlu menerapkan dengan tegas peraturan kepada perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan penduduk sekitar dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Ini tentunya akan berhasil dengan baik, jika pemerintah termasuk pemerintah daerah menjalankannya dengan transparan, dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh.

Selain melalui peningkatan derajat kesehatan, kualitas manusia dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk dapat mempunyai pengetahuan dan kemampuan ilmu yang dimilikinya, sehingga mampu bersaing di era pasar global. Namun yang penting lagi adalah etika moral dan pemahaman agama yang baik, sehingga dalam setiap tindakannya dapat sesuai aturan.

Peran Pemerintah

Kebijakan pemerintah diperlukan untuk menyeimbangkan antara kuantitas penduduk dengan kualitas lingkungan. Tentunya pemerintah dituntut untuk benar-benar serius memberi perhatian terhadap kelestarian lingkungan, dengan menerapkan *good governance*. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat. Orientasi tidak hanya untuk generasi saat ini, melainkan untuk generasi selanjutnya, supaya terhindar dari kelangkaan sumber daya dan kepunahan.

Terkait dengan penduduk dan penanganan lingkungan, pemerintah sampai saat ini sudah membuat peraturan perundangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur berbagai hal terkait dengan lingkungan hidup. Sementara terkait dengan kependudukan, terdapat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun yang paling penting adalah implementasi dari peraturan perundangan tersebut dalam kehidupan nyata. Berbagai peraturan dan moratorium terkait penggunaan sumber daya alam juga sudah banyak dibuat, namun kadang dalam implemantasinya jauh dari yang diharapkan. Apalagi era otonomi daerah, umumnya pemerintah daerah merasa mempunyai otonomi sendiri, sehingga kadang keputusannya bertentangan dengan peraturan lainnya yang sudah dibuat. Sebagai contoh peraturan mengenai hutan lindung, yang seharusnya tidak digunakan untuk fungsi lainnya misalnya untuk perumahan atau perkebunan atau industri. Namun tidak sedikit ditemukan bahwa hutan tersebut sudah beralih fungsi.

Pemerintah juga bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu menjalankan komitmen global. Sebelumnya tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada Tahun 2015. Setelah itu, Tanggal 2 Agustus 2015, berbagai Negara anggota PBB mengaklamasikan *Transforming OurWorld: the 2030 Agenda For SustainableDevelopment Goals* (SDGs)/UN 2030 Agenda. Komitmen SDGs tersebut disahkan pada sidang PPB Bulan September 2015, dengan mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan 2030. Pembangunan berkelanjutan dalam implementasinya dilakukan secara serentak mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin masa depan dunia dan umat manusia menuju kondisi yang lebih baik. Prinsip yang digunakan dalam pembangunan yaitu *No One will be left Behind*, yang artinya pelaksanaan pembangunan harus memberimanfaat untuk semua orang.

Sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap isu kependudukan dan lingkungan hidup, pemerintah melalui Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan televisi swasta, menyajikan acara hiburan “Kuis Keren” dengan tema penduduk dan lingkungan

Program yang dikemas dengan baik, namun sarat dengan tema kependudukan, dan melibatkan kaum generasi muda sebagai penerus di masa depan. Harapannya kaum generasi muda suah diberikan pengetahuan mengenai pentingnya penanganan kependudukan dan dampaknya terhadap lingkungan hidupnya. Gambar berikut memperlihatkan juri acara



Sumber: Acara Kuis Keren BKKBN, 2017

Gambar 3. Acara Kuis Keren BKKBN, Penduduk dan Lingkungan, 2017

Penutup

Penduduk dan lingkungannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus ditangani dengan baik untuk kesejahteraan penduduk. Namun banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu upaya mencari solusi pemecahannya, secara interdisiplin atau multidisiplin.

Demi menjaga kelestarian lingkungan dan upaya memenuhi kebutuhan hidup penduduk, orientasi pembangunan tidak semata ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun juga perlu memperhatikan aspek sosial dan dampaknya terhadap kesehatan penduduk. Selain itu, perlu ditunjang dengan kebijakan teknologi, yang mengarah kepada penekanan konservasi, *recycling* dan *renewability*.

Hal yang sangat penting lainnya, yang dianggap sebagai upaya efektif dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan adalah penduduk dibekali dengan perspektif kultural dan religius. Penduduk yang berpegang teguh pada ajaran agama dan menjunjung tinggi moralnya, maka dalam pandangan dan tingkah lakunya akan berpedoman pada aturan-aturan yang seharusnya.

Referensi

- <https://www.science.org.au/curious/earth-environment/population-environment>
1. . *Population and environment: a global challenge*. Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.
<http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>
 2. . *Countries in the world by population* (2017). Diunduh Tanggal 7 Februari 2018.
<https://www.populationpyramid.net/indonesia/2050/>
 3. . Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.
https://na.unep.net/geas/archive/pdfs/GEAS_Jun_12_Carrying_Capacity.pdf
 4. . *One Planet, How Many People? A Review of Earth's Carrying Capacity*. Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.
 5. Cohen, J. E. (1995a). *Population growth and earth's human carrying capacity*. *Science*, 269(5222), 341-346. doi: 10.1126/science.7618100. Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.
<http://www.depkes.go.id/article/view/17012300003/kualitas-manusia-ditentukan-pada-1000-hari-pertama-kehidupannya.html>
 6. . *Kualitas Manusia Ditentukan Pada 1000 Hari Pertama Kehidupannya*. Diunduh Tanggal 7 Februari 2018.
 7. Soemarwoto, Otto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan ke 5, Bandung: Penerbitan Djambatan.
 8. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>. *Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi*. Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.
 9. <http://ipi.perpusnas.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Sosialisasi-sustainable-developoptment-goals-sdgs-implementasi-di-perpustakaan.pdf>. Diunduh Tanggal 8 Februari 2018.